

Sosialisasi Peraturan Daerah Untuk Penguatan Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Probolinggo

Asror Karomah¹, Muhammad Subhan²

^{1, 2} Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Received : 9 Oktober 2025, Revised : 16 Oktober 2025, Published : 25 Oktober 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Asror Karomah

E-mail: Asrorkaromah2003@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kabupaten Probolinggo. Tujuan utama kegiatan adalah memperkuat pemahaman pemangku kepentingan serta mendorong koordinasi lintas sektor dalam implementasi regulasi. Metode yang digunakan berupa rapat interaktif dengan pendekatan diskusi santai namun terarah, melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Perkim, dan Dinas PUPR. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah BAPELITBANGDA berperan penting sebagai koordinator perencanaan daerah yang mengintegrasikan informasi hasil sosialisasi ke dalam dokumen pembangunan. Namun, sosialisasi masih terbatas pada lingkup birokrasi sehingga masyarakat desa sebagai penerima dampak langsung belum sepenuhnya terlibat. Beberapa kendala yang ditemui meliputi keterbatasan jangkauan sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Kata kunci - Sosialisasi, Penyelenggaraan Perumahan, dan Pemukiman.

Abstract

This community service activity was carried out in the form of socialization of the Regional Regulation (Peraturan Daerah or Perda) concerning the implementation of housing and settlement management in Probolinggo Regency. The main objective of this activity is to strengthen stakeholders' understanding and encourage cross-sectoral coordination in the implementation of the regulation. The method used is an interactive meeting with a relaxed yet structured discussion approach, involving the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPELITBANGDA), the Regional House of Representatives (DPRD), the Housing and Settlement Agency (Dinas PERKIM), and the Public Works and Spatial Planning Agency (Dinas PUPR). The results of the activity indicate that BAPELITBANGDA plays an important role as a regional planning coordinator that integrates the information obtained from the socialization into development planning documents. However, the socialization process remains limited to bureaucratic circles, so that rural communities as the direct beneficiaries have not been fully involved. Several challenges were identified, including limited outreach coverage, insufficient resources, and suboptimal inter-agency coordination.

Keywords - Socialization, Housing Implementation, Settlement Management.

How To Cite: Karomah, A., & Subhan, M. (2025). Sosialisasi Peraturan Daerah Untuk Penguatan Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1232 - 1239. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.601>

Copyright ©2025 Asror Karomah, Muhammad Subhan

PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks pembangunan daerah, penyelenggaraan perumahan yang layak menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Probolinggo, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), memiliki peran penting dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan perumahan. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman perlu disosialisasikan secara intensif agar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) bukan hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penataan permukiman yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menekankan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan yang layak. Menurut Permatasari et al. (2021) dan Ro'fah et al. (2022), efektivitas sosialisasi kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan komunitas dan komunikasi dua arah yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan komunitas tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses interpretasi dan adaptasi kebijakan di tingkat lokal. Sementara itu, komunikasi dua arah memungkinkan terjadinya umpan balik yang memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program pemerintah.

Kajian literatur terkait sosialisasi kebijakan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks perumahan, keberadaan Perda menjadi instrumen hukum yang harus dipahami oleh masyarakat agar penyelenggaraan perumahan berjalan sesuai rencana. Selain itu, peraturan perundangan yang relevan adalah: Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

Sosialisasi kebijakan seringkali dianggap sekadar agenda formal pemerintah-menggelar rapat, membagikan dokumen, atau mengumumkan lewat media resmi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses ini sebenarnya jauh lebih kompleks. Bagaimana masyarakat memahami isi kebijakan, merasa memiliki, dan pada akhirnya mau mematuhi, sangat bergantung pada kualitas sosialisasi (Howlett & Ramesh, 2003). Edward III (1980) menyebut ada empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), komunikasi adalah pintu pertama. Bahasa hukum yang terlalu teknis sering kali tidak dipahami masyarakat awam. Studi di Kediri, misalnya, memperlihatkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), warga baru menyadari bahwa "layak huni" tidak sekadar rumah berdinding kokoh, tetapi juga ventilasi sehat, sanitasi memadai, dan akses air bersih. Salah seorang peserta bahkan menuturkan, "*Saya kira rumah saya sudah layak, tapi ternyata lantai tanah itu tidak boleh. Baru saya tahu setelah sosialisasi ini.*" (Kahuripan, 2023). Bani Pamungkas et al. (2023) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat yang dibangun melalui proses komunikasi timbal balik. Partisipasi yang bermakna tidak hanya memperluas pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga menggeser posisi warga dari sekadar penerima informasi menjadi aktor penafsir kebijakan. Dengan demikian, sosialisasi kebijakan berfungsi ganda: memperkuat literasi publik sekaligus mengkonsolidasikan kepercayaan sosial terhadap lembaga pemerintah.

Faktor sumber daya juga menentukan. Penelitian di Kota Langsa, Aceh, menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga pendamping membuat banyak masyarakat tidak memahami prosedur administratif BSPS. Akibatnya, program tidak berjalan optimal meski sudah ada regulasi pendukung (Darma Agung Journal, 2023). Hal serupa juga tampak di Kabupaten Subang, di mana aparat desa mengakui bahwa tanpa dukungan intensif, warga kesulitan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan (Unsub Journal, 2022). Disposisi atau sikap aparat pelaksana juga tak kalah penting. Studi di Jakarta menemukan bahwa strategi komunikasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam program hunian terjangkau lebih efektif ketika aparat benar-benar memiliki komitmen dan menggunakan pendekatan public relations dua arah-mendengarkan keluhan warga, bukan hanya menyampaikan informasi satu arah (Jurnal Jupin, 2022).

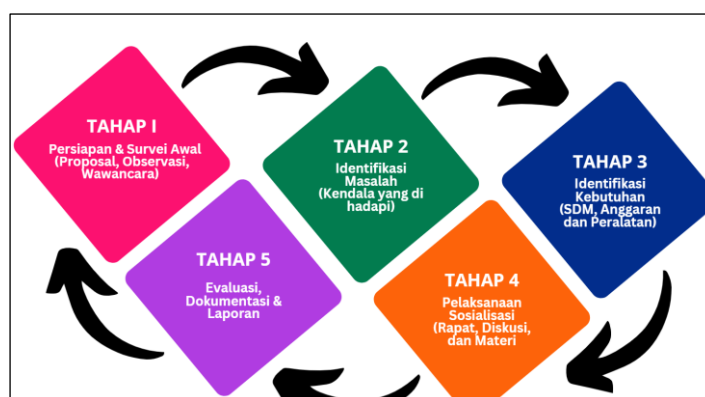
Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak bisa dilepaskan dari sikap dan motivasi

pelaksana di lapangan. Kerangka lain dari Mazmanian & Sabatier (1983) mengingatkan bahwa kondisi sosial dan politik di masyarakat juga menentukan. Daerah dengan literasi hukum rendah, sosialisasi bisa gagal meski pemerintah sudah berupaya keras. Sementara itu, systematic review terbaru oleh Al-Zayn Journal (2024) yang menelaah lebih dari 600 artikel tentang perumahan subsidi di Indonesia menemukan pola umum: kebijakan sering kali bagus di atas kertas, tetapi gagal diterjemahkan di lapangan karena jurang informasi antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat. Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi Perda di Kabupaten Probolinggo tidak cukup diukur dari "berapa kali rapat dilakukan" atau "berapa banyak brosur disebar." Yang lebih penting adalah apakah komunikasi berjalan jelas, sumber daya mencukupi, aparat pelaksana punya komitmen, dan struktur birokrasi mampu bekerja lintas sektor. Hanya dengan melihat keempat dimensi tersebut, kita bisa menilai sejauh mana sosialisasi benar-benar mendukung implementasi kebijakan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan menggunakan pendekatan percakapan santai dan terfokus pada rapat dengan pihak terkait yang melibatkan pejabat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Probolinggo. Menjelaskan tentang percakapan atau diskusi santai (informal conversation interview) terfokus dengan pihak terkait dapat digunakan sebagai metode refleksi dan evaluasi yang sering digunakan di lapangan dalam kegiatan pengabdian untuk menggali informasi dari masyarakat, sebagaimana dikemukakan J.P. Spradley (2016). Pengabdian ini dipilih karena sosialisasi Perda bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan dipahami, diinternalisasi, dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan dan survei awal melalui penyusunan proposal serta koordinasi bersama melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Probolinggo. Survei sederhana dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara singkat untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi mitra. Dari hasil survei, dilakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan implementasi Perda, seperti keterbatasan jangkauan sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Setelah itu, ditentukan pula kebutuhan yang perlu dipenuhi agar kegiatan berjalan efektif, mencakup sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta media komunikasi yang tepat. Tahap inti kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi dengan pendekatan diskusi santai namun terarah, yang melibatkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Perkim, dan Dinas PUPR. Melalui forum ini, para peserta dapat menyamakan persepsi, bertukar pandangan, dan memperkuat pemahaman terkait isi serta tujuan Perda. Usai pelaksanaan, dilakukan evaluasi untuk menilai capaian kegiatan, dilengkapi dokumentasi berupa notulen, foto, dan daftar hadir sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan refleksi. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian dirangkum dalam laporan pengabdian dan artikel jurnal pengabdian, yang tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban akademis, tetapi juga kontribusi praktis bagi penguatan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kabupaten Probolinggo.



Gambar 1. Diagram alur tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perda tentang penyelenggaraan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Probolinggo telah dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan tatap muka, seminar, publikasi, dan media sosial. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Kegiatan yang diikuti melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) menghadirkan narasumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal ini sejalan dengan temuan Ainurrohman & Mursyidah (2024) serta Taurista & Choiriyah (2024) yang menekankan bahwa komunikasi publik dan kepemimpinan lokal merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Komunikasi publik yang efektif memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sementara kepemimpinan lokal berperan sebagai penghubung yang menerjemahkan pesan kebijakan ke dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Kombinasi keduanya memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipahami, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari warga.

A. Peran BAPELITBANGDA

Sebagai peserta sekaligus koordinator perencanaan daerah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) berperan menerima dan mengintegrasikan informasi dari sosialisasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Namun, karena sifat sosialisasi masih terbatas pada instansi pemerintah, peran melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) lebih pada fungsi koordinatif antar lembaga, belum sampai pada penyampaian informasi langsung kepada masyarakat.

B. Kendala

Ada tiga kendala utama yang terlihat:

1. Keterbatasan jangkauan sosialisasi. Karena peserta hanya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), masyarakat dan pemangku kepentingan lain di tingkat desa tidak secara langsung terlibat. Akibatnya, informasi tentang Perda masih berputar di lingkaran birokrasi.
2. Keterbatasan sumber daya. Anggaran yang tersedia membuat kegiatan sosialisasi dilakukan secara terbatas, tanpa format lanjutan ke desa-desa.
3. Koordinasi antarinstansi. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Perkim, dan Dinas PUPR menunjukkan ada upaya lintas sektor, tetapi koordinasi belum optimal. Materi yang disampaikan oleh masing-masing instansi kadang berbeda fokus, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.

Jika dibandingkan dengan kerangka Edward III, kendala ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi (pesan belum menjangkau masyarakat), sumber daya (anggaran terbatas), dan struktur birokrasi (koordinasi belum solid) masih menjadi titik lemah utama. Sedangkan menurut Firnanda et al. (2024) dan Timur et al. (2022) menunjukkan hambatan serupa terkait keterbatasan sumber daya manusia, dukungan finansial, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Hambatan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas sosialisasi, karena pesan kebijakan sering kali terhenti di tingkat birokrasi tanpa menjangkau masyarakat. Dalam konteks ini, koordinasi antarlembaga bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dalam mengelola kolaborasi lintas sektor.

C. Solusi

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Meluaskan peserta sosialisasi, tidak hanya instansi pemerintah, tetapi juga perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok komunitas.
2. Memperjelas peran tiap instansi, agar materi yang disampaikan konsisten dan tidak tumpang tindih.
3. Mengembangkan strategi berjenjang, misalnya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) yang telah mengikuti sosialisasi

kemudian bertugas melakukan penyampaian kembali (cascade) ke masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana.

Dengan cara ini, sosialisasi tidak berhenti di lingkup birokrasi, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh Peraturan Daerah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kabupaten Probolinggo. Bentuk kegiatan dipilih dalam format rapat, karena forum tatap muka dianggap mampu menghadirkan suasana santai namun tetap fokus. Dengan cara ini, para peserta—yang terdiri dari melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR—dapat lebih leluasa menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman, sekaligus menyamakan persepsi tentang implementasi Perda di lapangan.



Gambar 2. Suasana rapat sosialisasi Perda sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat

Dalam forum ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) tampil sebagai koordinator perencanaan daerah yang menerima sekaligus mengintegrasikan informasi hasil pengabdian masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Meski begitu, karena sosialisasi masih terbatas pada lingkup instansi pemerintah, peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) lebih banyak bersifat koordinatif antarlembaga dan belum menjangkau masyarakat secara langsung.



Gambar 3. Diskusi interaktif lintas instansi dalam rangka pengabdian masyarakat

Dari pelaksanaan kegiatan ini, terlihat adanya sejumlah kendala. Pertama, jangkauan sosialisasi masih terbatas pada kalangan birokrasi sehingga masyarakat desa sebagai penerima dampak langsung dari Perda belum banyak terlibat. Kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan kegiatan hanya bisa dilakukan secara sederhana dan belum berlanjut ke tingkat desa. Ketiga, koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya solid, terlihat dari perbedaan fokus materi yang disampaikan oleh instansi terkait. Jika ditinjau dengan kerangka Edward III, kendala tersebut mencakup aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Tabel 1. Kendala kegiatan

Aspek	Temuan Lapangan	Implikasi
Komunikasi	Pesan belum menjangkau masyarakat	Informasi masih terbatas pada birokrasi
Sumber Daya	Anggaran terbatas, SDM terbatas	Sosialisasi belum menjangkau desa-desa
Struktur Birokrasi	Koordinasi antarinstansi belum solid	Materi tidak seragam, berpotensi membingungkan

Untuk menjawab kendala tersebut, beberapa langkah solusi ditawarkan. Pertama, memperluas peserta sosialisasi dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok komunitas agar informasi tidak hanya berhenti di level birokrasi. Kedua, memperjelas peran tiap instansi supaya materi lebih konsisten dan mudah dipahami. Ketiga, menerapkan strategi berjenjang (*cascade*), dimana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) yang telah menerima sosialisasi bertugas menyampaikan kembali informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) sangat penting sebagai koordinator perencanaan dan fasilitator lintas sektor. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk rapat interaktif terbukti mampu menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi antarinstansi, meskipun masih terbatas pada lingkup birokrasi. Dari pelaksanaan kegiatan, ditemukan sejumlah kendala utama, antara lain keterbatasan jangkauan sosialisasi yang belum menyentuh masyarakat desa, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan kerangka Edward III yang menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih luas, inklusif, dan berjenjang. Pelibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta komunitas lokal akan memperluas jangkauan informasi. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) juga dapat diperkuat dengan model *cascade*, yaitu menyampaikan kembali hasil sosialisasi kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya berhenti pada forum birokrasi, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Spradley, J. P (2016). *Participant Observation*. Long Grove: Waveland Press.
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (3rd ed.). Berkeley: University of California Press.

- Kahuripan, J. (2023). Sosialisasi tentang pentingnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdikmas*, 4(2), 112–121. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/abdikmas/article/view/1524>
- Darma Agung Journal. (2023). Analisis implementasi kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Langsa, Provinsi Aceh. *Creative Research Management Journal* 6(1), 55-68. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/creativeagung/article/view/4923>
- Universitas Subang (Unsub). (2022). Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. *Jurnal Pascasarjana Unsub*, 3(1), 77–89. <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/PASCA/article/view/1452>
- Jupin Journal. (2022). Strategi public relations Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam sosialisasi program hunian terjangkau di Jakarta. *Jurnal Publikasi Indonesia (Jupin)*, 8(2), 45–57. <https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/881>
- Al-Zayn Journal. (2024). Dampak kebijakan perumahan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah: Systematic literature review 2020–2025. *Jurnal Al-Zayn: Ekonomi dan Sosial*, 5(1), 33–49. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1388>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Ro'fah, R., Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2022). The Long Road to Social Inclusion: Participation of Vulnerable Groups in Village Development. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/2482>
- Wiratmoko, D., & Wiro, M. (2025). The Implementation of the Self-Help Housing Stimulus Program (BSPS) to Improve Housing Quality and Community Welfare in Retok Village. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(6), 1910-1919. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i6.1729>
- Utari, D., & Anggalana, A. (2023). Implementation of Public Infrastructure, Facilities, and Utilities Development Assistance Program For Low-Income Community Housing in The City of Palembang. *Veteran Law Review*, 6(1), 105-121. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i1.4895>
- Asyrafinafilah Hasanawi, Masturi, & Adib Hasanawi. (2022). Improvement of Community Governance to Support Slum Upgrading Programs in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/88>
- Aji M. F. Firnanda, B. Satriya, & P. Sukowati. (2024). Reinventing Social Policy in Housing Finance Policies for Low-Income Communities. *International Journal of Research in Social Science*, 5(4), 66-90. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.4.8>
- Bani Pamungkas, E. Sutrisno, & M. Yusuf. (2023). Initiating the Implementation of Meaningful Public Participation in Forming Regulations in Urban Areas. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*. <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/29284/pdf>
- Sulistiyono & H. Sukmana. (2024). Participation of LPMD in Village Infrastructure Development. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). https://www.researchgate.net/publication/383111296_Role_of_Village_Community_Empowerment_Institutions_in_Infrastructure_Development_in_The_Tengguluan_Village_Government_Temple_District_Sidoarjo_District_Peran_Lembaga_Pemberdayaan_Masyarakat_Desa_dala
- M. A. Ainurrohman & L. Mursyidah. (2024). Overcoming Barriers in Infrastructure Development Planning and Community Involvement. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://www.semanticscholar.org/paper/Overcoming-Barriers-in-Infrastructure-Development-Ainurrohman-Mursyidah/4dce800c8e5b9047c754a3eb621ea68e4a1a1776>

- H. Taurista & I. U. Choiriyah. (2024). Community Participation in Development Planning Driven by Leadership, Communication, and Education. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1080>
- Aini Timur, T. Gunawan, & Suparman. (2022). Implementation of Housing and Residential Area Development Through Rejuvenation of the Kedaung Area. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v15i1.5215>
- I. Amirullah & S. Batti. (2023). Assessing Community Participation In Public Policy-Making In Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*. <https://doi.org/10.61132/epaperbisnis.v1i3.90>
- A. Ayu & S. Saipul. (2024). The Community Participation in Infrastructure Development in Penda Muntei Village. *Indonesia Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 155-164. <https://doi.org/10.70074/ijpag.v1i2.47>